



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ANDALAS**

SKRIPSI

**ANALISIS SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DALAM RANGKA MEMAKSIMALKAN PENERIMAAN PAJAK
PADA KANTOR PELAYANAN PBB
KOTA PADANG**

Oleh

RIKO PUTRA
BP. 02 157 032

Mahasiswa Program S-1 Jurusan Akuntansi

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memenuhi Sebagian
Persyaratan Meraih Gelar Sarjana Ekonomi pada
Fakultas Ekonomi Universitas Andalas*

P A D A N G
2009



No Alumni Universitas

Riko Putra

No Alumni Fakultas:

BIODATA

a). Tempat/Tgl Lahir : Singkarak / 27 Juli 1984, b). Nama Orang Tua : H. Jalinus, St. Basa c). Fakultas : Ekonomi Program S-1 Ekstensi, d). Jurusan : Akuntansi, e.) No.Bp : 02157032 f). Tanggal Lulus : 08 Agustus 2008 h). Prediket lulus : Memuaskan g). IPK : 2,39 h). Lama Studi : 7 tahun 0 bulan i). Alamat Orang Tua: Singkarak Kabupaten Solok.

ANALISIS SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM RANGKA
MEMAKSIMALKAN PENERIMAAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PBB
KOTA PADANG

Skripsi S1 Oleh **Riko Putra**, Pembimbing : **Dra. Riza Reni Yenti, M.Si, Akt**

ABSTRAK

Pelaksanaan sistem pemungutan pajak yang baik adalah dapat meningkatkan penerimaan karena semuanya dilakukan sesuai dengan sistem yang telah ditetapkan. Penggunaan sistem *self assessment* dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan sangat efektif dalam mengoptimalkan penerimaan pajak. Sistem ini menuntut wajib pajak untuk aktif dalam melaksanakan kewajiban maupun hak perpajakannya. Dalam sistem *self assessment* ini tidak memperhatikan bagaimana kondisi ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat karena bagaimanapun kondisinya sistem *self assessment* tetap harus berjalan dengan baik. sehingga penerimaan pajak dapat optimal. Hasil penelitian memberikan indikasi bahwa sistem pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada KP-PBB Kota Padang menggunakan sistem *official assesmen* yaitu sistem pengenaan pajak yang dibayar oleh wajib pajak setelah terlebih dulu ditetapkan oleh kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk melalui Surat Keputusan Pajak Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan. Namun untuk lebih meningkatkan penerimaan PBB maka sebaiknya KP-PBB menggunakan sistem *self assessment* karena sisitem ini lebih efisien untuk dapat meningkatkan penerimaan pajak, disamping itu dengan sistem *self assessment* masyarakat (wajib pajak) dituntut lebih aktif dalam memenuhi kewajibannya, sehingga penerimaan pajak dapat meningkat. Langkah-langkah yang ditempuh KP-PBB kota Padang dalam mengatasi kendala-kendala mempertahankan prinsip-prinsip tersebut, maka perpajakan daerah harus memiliki ciri-ciri : Pajak daerah secara ekonomis dapat dipungut, berarti perbandingan antara penerimaan pajak harus lebih besar dibandingkan ongkos pemungutannya. Relatif stabil, artinya penerimaan pajaknya tidak berfluktuasi terlalu besar, kadang-kadang meningkat secara drastis dan adakalanya menurun secara tajam, Tax basenya harus merupakan perpaduan antara prinsip keuntungan (benefit) dan kemampuan untuk membayar (*ability to pay*).

Skripsi telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 01 November 2008, dengan penguji :

Tanda Tangan	1.	2.
Nama Terang	Drs. Arizal Putra, M.Si, Akt	Dra. Nini Syofriyeni, M.Si, Akt

Mengetahui :

Ketua Jurusan : **Dr. H. Yuskar, SE, MA, Akt**
NIP. 131 629 305

Tandatangan

Alumnus telah mendaftar ke fakultas dan telah mendapat Nomor Alumnus:

Petugas Fakultas / Universitas		
No Alumni Fakultas	Nama:	Tanda tangan:
No Alumni Universitas	Nama:	Tanda tangan:

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia saat ini sedang mengalami berbagai permasalahan di berbagai sektor khususnya sektor ekonomi. Naiknya harga minyak dunia, tingginya tingkat inflasi, naiknya harga barang-barang dan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika serta turunnya daya beli masyarakat telah menjadi masalah yang sangat rumit yang harus diselesaikan oleh pemerintah.

Untuk tetap dapat bertahan dan memperbaiki kondisi ekonomi yang ada, pemerintah harus mengupayakan semua potensi penerimaan yang ada. Pada saat ini tengah digali berbagai macam potensi untuk meningkatkan penerimaan negara, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Namun seiring dengan berkembangnya kemampuan analisis para praktisi ekonomi yang menyatakan bahwa mengandalkan pinjaman dari luar negeri sebagai salah satu sumber penerimaan negara hanya akan menjadi bumerang dikemudian hari, potensi penerimaan dari pinjaman luar negeri akan semakin dikurangi.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Indonesia akan berusaha untuk lebih meningkatkan potensi penerimaan negara dari dalam negeri, dan tidak dapat dipungkiri lagi bahwa pajak telah memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan negara.

Penerimaan dari sektor pajak terbagi menjadi dua golongan, yaitu dari pajak langsung contohnya pajak penghasilan dan pajak tidak langsung contohnya pajak pertambahan nilai, bea materai, bea balik nama. Dilihat dari segi penerimaan, pajak penghasilan dapat membantu negara dalam membiayai pengeluaran, namun tidak semua orang dapat dikenakan PPh. Pajak Penghasilan hanya dapat dikenakan kepada orang pribadi yang telah berpenghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Tetapi hal itu tidak berlaku bagi Pajak Pertambahan Nilai, karena pajak tersebut dapat dilimpahkan kepada orang lain sehingga memungkinkan semua orang dapat dikenakan PPN, dan juga seperti hampir seluruh barang-barang kebutuhan hidup rakyat Indonesia merupakan hasil produksi yang terkena PPN.

Dengan kata lain, hampir semua transaksi di bidang perdagangan, industri dan jasa yang termasuk dalam golongan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak pada prinsipnya terkena PPN. Oleh karena itu walaupun seseorang belum memiliki NPWP namun ia tetap terkena PPN namun dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak sebagai pihak yang berhak memungut PPN yang nantinya PPN yang dipungut tersebut akan disetorkan ke kas Negara.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah salah satu sumber penerimaan Negara, yang dikelola dan diserahkan kepada Pemerintah Daerah, meskipun statusnya masih pajak Negara. Hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 552/KMK.03/2002 tentang hasil penerimaan PBB yang merupakan penerimaan Negara yang dibagi antara Pemerintah pusat dengan Pemerintah Daerah.

BAB V

P E N U T U P

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Memberikan indikasi bahwa sistem pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada KP-PBB Kota Padang menggunakan sistem *official assessmen* yaitu sistem pengenaan pajak yang dibayar oleh wajib pajak setelah terlebih dulu ditetapkan oleh kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk melalui Surat Keputusan Pajak Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan. Namun untuk lebih meningkatkan penerimaan PBB maka sebaiknya KP-PBB menggunakan sistem *self assessment* karena sistem ini lebih efisien untuk dapat meningkatkan penerimaan pajak, disamping itu dengan sistem *self assessment* masyarakat (wajib pajak) dituntut lebih aktif dalam memenuhi kewajibannya, sehingga penerimaan pajak dapat meningkat.
2. Langkah-langkah yang ditempuh KP-PBB kota Padang dalam mengatasi kendala-kendala mempertahankan prinsip-prinsip tersebut, maka perpajakan daerah harus memiliki ciri-ciri : Pajak daerah secara ekonomis dapat dipungut, berarti perbandingan antara penerimaan pajak harus lebih besar dibandingkan ongkos pemungutannya, Relatif stabil, artinya penerimaan pajaknya tidak berfluktuasi terlalu besar, kadang-kadang meningkat secara drastis dan